



# BUKU PEDOMAN DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

**KOTA DUMAI TAHUN 2025**

#DumaiMenujuKotaLayakAnak

[www.dpppa.dumaikota.go.id](http://www.dpppa.dumaikota.go.id)

## KATA PENGANTAR



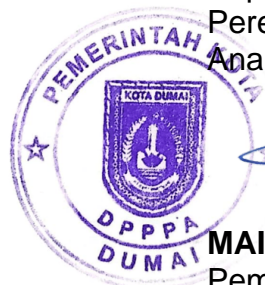
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Pedoman Data Terpilah Gender dan Anak Kota Dumai ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana kita pahami bersama, data terpilah gender dan anak berperan strategis dalam membantu pengambil kebijakan untuk memahami kondisi dan kebutuhan spesifik antara perempuan, laki-laki, dan anak. Melalui data ini, perbedaan dan kesenjangan yang ada dapat diidentifikasi dengan lebih jelas, sehingga kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Kami berharap buku pedoman ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat mekanisme koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan data terpilah gender dan anak di Kota Dumai. Dengan demikian, diharapkan akan tumbuh komitmen bersama untuk mengimplementasikan strategi pembangunan yang responsif gender dan menjamin pemenuhan hak anak secara menyeluruh.

Semoga hadirnya buku pedoman ini dapat mendukung upaya Pemerintah Kota Dumai dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, setara, dan ramah bagi tumbuh kembang anak, serta menjadi pijakan kuat bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kota Dumai.

Dumai, Oktober 2025  
Kepala Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan  
Anak Kota Dumai



**MAINI ASNA, S.K.M., M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19680529 198903 2 002

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Pedoman .....	3
1.3 Sasaran Pengguna.....	3
1.4 Dasar Hukum.....	4
<b>BAB II KONSEP DASAR DATA TERPILAH</b> .....	5
2.1 Definisi.....	5
2.2 Pentingnya Data .....	6
2.3 Jenis Data .....	7
2.4 Jenis Data Gender dan Anak.....	8
2.4.1 Data Gender.....	8
2.4.2 Data Anak.....	11
<b>BAB III PRINSIP DAN STANDAR</b> .....	12
3.1 Prinsip Utama .....	12
3.2 Standar Variabel.....	13
3.3 Ketidaktepatan dalam Pengelolaan Data Secara Umum .....	14
<b>BAB IV FORMAT PENYUSUNAN DATA</b> .....	15
4.1 Format Tabel Penyajian Data Terpilah .....	15
4.1.1 Contoh Penyajian Data dalam Bentuk Tabel .....	15
4.1.2 Contoh Penyajian Data dalam Bentuk Grafik/Gambar .....	16
<b>BAB V ALUR PENGUMPULAN DAN PELAPORAN</b> .....	17
5.1 Proses Pengumpulan .....	17
5.2 Mekanisme Pelaporan .....	18
5.3 Contoh Penerapan Data Terpilah Gender dan Anak.....	19
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	21
6.1 Ringkasan .....	21
6.2 Ajakan .....	21
6.3 Harapan.....	22
<b>REFERENSI</b> .....	23
<b>LAMPIRAN</b> .....	24

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tempat Pelayanan, dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2025.....	15
Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Dinas Kesehatan Tahun 2025 .....	15

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Kecamatan Tahun 2024 .....	16
---	----

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya strategis untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, usia, wilayah tempat tinggal, suku, agama, maupun status sosial. Prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan telah menjadi komitmen global melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)* menegaskan pentingnya pembangunan inklusif dan berkeadilan bagi semua. Salah satu tujuan utama SDGs, yaitu mencapai kesetaraan gender menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak.

Komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang menekankan pentingnya keterpaduan data dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak, memperkuat tata kelola data gender dan anak agar terintegrasi dalam sistem Satu Data Indonesia. Regulasi ini menjadi landasan utama bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan. Data gender dan anak yang dimaksud mencakup berbagai aspek, antara lain kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, dan perlindungan khusus anak.

Sebagai wujud komitmen lokal, Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender menetapkan PUG sebagai strategi yang mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan. Dalam perda ini juga diatur bahwa setiap perangkat daerah wajib melakukan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG, serta

mematuhi sanksi administratif jika kewajiban tersebut diabaikan. Di sisi kelembagaan, Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2023 menata susunan organisasi dan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, menjadikannya instansi teknis pusat penanggung jawab urusan perempuan dan perlindungan anak.

Pemerintah Kota Dumai telah menunjukkan komitmen dalam mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan gender dan peduli anak melalui berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perangkat daerah terkait. Namun demikian, implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di tingkat kota masih menghadapi tantangan, seperti belum optimalnya integrasi data antarperangkat daerah, serta belum tersedianya sistem data terpilah gender dan anak yang komprehensif dan berkelanjutan. Ketersediaan data terpilah gender dan anak menjadi elemen vital dalam mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Data ini berfungsi sebagai dasar analisis dalam menentukan prioritas pembangunan, serta sebagai alat pemantauan dan evaluasi capaian program yang responsif gender dan peduli anak. Tanpa data yang terpilah dengan baik, potensi ketimpangan dan kerentanan kelompok perempuan dan anak sering kali tidak terlihat secara nyata, sehingga menyulitkan upaya intervensi kebijakan yang efektif.

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Dumai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola data secara sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan. Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah di Kota Dumai dalam:

1. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak sesuai prinsip *Satu Data Indonesia*;
2. Memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung implementasi PUG dan PUHA;

3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan peduli anak; serta
4. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, khususnya dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan anak, dan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai secara menyeluruh.

Dengan adanya pedoman ini, Pemerintah Kota Dumai diharapkan dapat memperkuat peran dan tanggung jawabnya dalam penyediaan data yang berkualitas, akurat, dan berperspektif gender serta anak sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkeadilan sosial.

### **1.2 Tujuan Pedoman**

Berikut adalah tujuan penyusunan Pedoman Data Terpilah Gender dan Anak:

- a. Memberikan acuan bagi seluruh OPD dan instansi vertikal di Kota Dumai dalam memilah menurut jenis kelamin dan umur, menyusun dan menyajikan data secara terstandar, terpadu, akurat, komprehensif dan mutakhir.
- b. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah baik daerah dan pusat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip data responsif gender dan peduli anak.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah yang akurat, valid, dan mudah diakses untuk mendorong terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di Kota Dumai.

### **1.3 Sasaran Pengguna**

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, sebagai penghasil utama data sektoral.
- b. Instansi vertikal di wilayah Kota Dumai, yang memiliki data dan informasi terkait isu gender dan anak.

- c. Bidang Data dan Informasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, sebagai koordinator dalam pengumpulan, integrasi, dan analisis data terpilah.
- d. Lembaga masyarakat, akademisi, dan mitra pembangunan di Kota Dumai, yang berperan dalam pengolahan, penelitian, dan advokasi berbasis data gender dan anak.

#### **1.4 Dasar Hukum**

1. Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengarustamaan Gender
6. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Satu Data Kota Dumai
7. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 60 Tahun 2024 Tentang Sistem Informasi Gender Dumai

## **BAB II**

### **KONSEP DASAR DATA TERPILAH**

#### **2.1 Definisi**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Kota Dumai, pemahaman yang benar mengenai konsep dasar data terpilah menjadi hal yang sangat penting. Beberapa istilah kunci yang digunakan dalam pedoman ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Gender adalah proses mengidentifikasi dan memahami perbedaan kondisi, kebutuhan, dan peluang antara laki-laki dan perempuan yang dihasilkan dari data terpilah, untuk digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
3. Data Anak adalah data yang menggambarkan kondisi, situasi, dan kesejahteraan anak dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan, partisipasi, dan lingkungan tumbuh kembangnya.
4. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran, dan kondisi antara laki-laki dan perempuan
5. Data Terpilah adalah data yang dipilah menurut jenis kelamin dan umur.
6. Data Responsif Gender adalah data yang tidak hanya terpilah menurut jenis kelamin, tetapi juga mampu menunjukkan ketimpangan, hambatan, atau perbedaan peran sosial antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
7. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat.

8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mewujudkan Kesetaraan Gender, melalui integrasi perspektif Gender ke dalam proses pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan.
9. Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundanganundangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Responsif Gender adalah perhatian secara konsisten dan sistematis untuk merespons kebutuhan, permasalahan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender.

Dengan demikian, data terpilah gender dan anak bukan sekadar angka statistik, tetapi merupakan alat analisis untuk mengungkap kesenjangan dan memastikan agar kebijakan pembangunan lebih adil dan inklusif.

## **2.2 Pentingnya Data**

Data terpilah memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan gender dan ramah anak. Beberapa alasan utamanya adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Perencanaan dan Penganggaran

Data terpilah menjadi bahan utama dalam penyusunan rencana dan anggaran yang responsif gender serta berpihak pada anak. Dengan data

yang terpisah menurut jenis kelamin dan umur, pemerintah dapat merancang program yang sesuai kebutuhan masing-masing kelompok.

b. Mengidentifikasi Kesenjangan dan Ketimpangan

Melalui data terpilah, pemerintah dapat melihat perbedaan kondisi antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun perlindungan sosial.

c. Alat Monitoring dan Evaluasi PUG dan Perlindungan Anak

Data terpilah menjadi dasar untuk memantau kemajuan pelaksanaan PUG dan program perlindungan anak di Kota Dumai. Dengan data yang akurat, efektivitas kebijakan dapat dievaluasi secara objektif.

d. Penyusunan Indikator Kinerja dan Pembangunan Daerah

Data terpilah membantu dalam penyusunan indikator pembangunan daerah yang sensitif gender, serta dalam pelaporan capaian pembangunan berbasis gender dan anak (misalnya laporan TPB/SDGs, Renja, atau RPJMD).

e. Dasar Advokasi dan Pengambilan Keputusan

Data terpilah menjadi landasan bagi pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam melakukan advokasi dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Dengan kata lain, tanpa adanya data terpilah yang akurat, pelaksanaan PUG dan perlindungan anak di Kota Dumai tidak dapat diukur secara tepat.

### 2.3 Jenis Data

Data terpilah gender dan anak dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat, sumber, dan bentuk penyajian. Adapun jenis-jenis data yang digunakan dalam pedoman ini meliputi:

1. Berdasarkan Sifatnya

- a. Data Kuantitatif: Data berupa angka yang dapat dihitung, seperti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, angka partisipasi sekolah, atau tingkat kematian ibu.

- b. Data Kualitatif: Data berupa informasi deskriptif, seperti alasan tidak berpartisipasi dalam pendidikan, pengalaman kekerasan, atau hambatan sosial budaya.
2. Berdasarkan Sumbernya
    - a. Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari hasil survei, wawancara, atau pengamatan oleh OPD atau instansi terkait.
    - b. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari laporan resmi instansi, publikasi statistik, atau sistem informasi yang sudah ada (misalnya BPS, Dinkes, Disdik, DP3A, dan sebagainya).
  3. Berdasarkan Bentuk Penyajiannya
    - a. Data Terpilah Jenis Kelamin (*Sex-disaggregated Data*), memisahkan data laki-laki dan perempuan untuk mengetahui perbedaan jumlah atau proporsi.
    - b. Data Responsif Gender, menunjukkan penyebab atau faktor sosial yang menyebabkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
    - c. Data Anak Terpilah Menurut Kelompok Umur, misalnya 0–4 tahun, 5–9 tahun, 10–14 tahun, dan 15–17 tahun, untuk melihat situasi anak berdasarkan tahap perkembangan usia.

## 2.4 Jenis Data Gender dan Anak

### 2.4.1 Data Gender

1. **Data gender bidang ekonomi**, antara lain isu gender di bidang ketenagakerjaan, Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM), industri dan perdagangan, pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, perhubungan, Iptek dan infrastruktur. Berikut contoh jenis data terpilah:
  - a. Ketenagakerjaan, perbedaan upah laki-laki perempuan, tingkat partisipasi angkatan kerja, pekerja informal, pekerja migrant, pekerja rumahtangga, peserta program padat karya, peserta program teknologi tepat guna (TTG), pencari kerja, peserta pendidikan dan pelatihan kerja,

- b. KUKM, keanggotaan koperasi, penerima kredit usaha rakyat, peserta pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pelaku usaha mikro dan kecil,
- c. Jasa keuangan, literasi finansial (pengetahuan dan kesadaran terhadap mengelola keuangan, pengetahuan tentang produk keuangan, kepemilikan account perbankan, akses terhadap kredit perbankan dan nonperbankan)
- d. Industri dan perdagangan, stereotipe gender dalam industri pariwisata, isu gender dalam krisis ekonomi global, kesetaraan gender dalam kebijakan perdagangan di era globalisasi dan liberalisasi, peserta program beasiswa tenaga penyuluh lapangan industri kecil dan menengah,
- e. Pertanian, kepastian akses yang setara untuk perempuan dan laki-laki terhadap informasi, permodalan, keterampilan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian, tren tenaga kerja disektor pertanian menurut jenis kelamin, data kepemilikan lahan pertanian menurut jenis kelamin,
- f. Kehutanan, peran perempuan sekitar hutan dalam menjaga kelestarian hutan dan menopang kebutuhan energi rumah tangga, kerentanan masyarakat (laki-laki, perempuan, dan anak) terhadap dampak perubahan iklim, peserta pendidikan dan pelatihan sektor kehutanan, akses terhadap sumber daya kehutanan
- g. Perikanan dan kelautan, data pengembangan pengelolaan usaha nelayan perempuan dan laki-laki, pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan perempuan dan laki-laki, akses perempuan nelayan terhadap pemodal/kredit, akses perempuan nelayan terhadap penyuluhan dan keterampilan, peserta pendidikan dan pelatihan pegawai sektor kelautan dan perikanan,
- h. Perhubungan, isu gender di transportasi umum (keselamatan, pelecehan seks, keterjangkauan terhadap transportasi umum, akses terhadap kebutuhan khusus perempuan, peserta didik

sekolah tinggi pelayaran, penerbangan, transportasi darat, sarana dan prasarana transportasi yang responsif gender, peserta diklat penjenjangan,

- i. Iptek dan infrastruktur, isu gender dalam iptek, teknologi responsif gender, akses terhadap teknologi yang ramah lingkungan dan ramah gender, jumlah melek TIK, jumlah pengguna TIK, peserta diklat penjenjangan,

**2. Data gender bidang politik, sosial, dan hukum,** antara lain isu gender bidang pendidikan, kesehatan, Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan, politik dan pengambilan keputusan, dan pertahanan keamanan. Berikut contoh jenis data terpilah:

- a. Pendidikan, data sertifikasi guru perempuan dan laki-laki, partisipasi pendidikan, partisipasi PAUD, trend rasio pendidikan, andil pendidikan dalam terbentuknya relasi gender yang setara);
- b. Kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI), penolong persalinan, angka kesakitan, isu gender dan kesehatan dalam era globalisasi);
- c. SDA dan lingkungan, akses perempuan terhadap SDA (air bersih, lahan, sanitasi), dan sebagainya,
- d. Politik dan pengambilan keputusan, keterwakilan perempuan di parlemen, keterwakilan perempuan di partai politik, keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga eksekutif dan yudikatif);
- e. Pertahanan keamanan, peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian; peserta diklat penjenjangan);
- f. Hukum, peraturan perundang-undangan yang bias gender, jumlah aparat penegak hukum, jumlah kasus hukum, dan sebagainya.

**3. Data perlindungan hak perempuan,** antara lain data kekerasan terhadap perempuan dan korban perdagangan orang (*trafficking*), berikut contoh jenis data terpilah:

- a. Kekerasan terhadap perempuan antara lain data korban kekerasan, data pelaku kekerasan, dan sebagainya;

- b. Korban perdagangan orang (*trafficking*) antara lain data korban perdagangan orang, penanganan hukum, pelayanan korban, daerah pengirim, transit, dan tujuan, dan sebagainya.
4. **Data pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga** meliputi data keluarga pra keluarga sejahtera, keluarga sejahtera I s.d. III, data legalitas keluarga, data ketahanan fisik keluarga, data ketahanan ekonomi keluarga, data ketahanan sosial psikologi keluarga, dan data ketahanan sosial bidang keluarga.

#### 2.4.2 Data Anak

Jenis data pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak, terdiri atas 5 (lima) kluster kebutuhan hak anak, meliputi:

1. **Hak sipil dan kebebasan**, data anak yang memiliki akte kelahiran, informasi layak anak, lembaga partisipasi anak;
2. **Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif**, data tentang lembaga konsultasi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;
3. **Kesehatan dasar dan kesejahteraan**, data kematian bayi, status gizi balita, imunisasi, dan data rumah tangga dengan akses air bersih;
4. **Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya**, data partisipasi sekolah dan data sekolah ramah anak;
5. **Perlindungan khusus**, data anak berkebutuhan khusus (disabilitas, autisme, istimewa), data kekerasan terhadap anak, data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), data anak jalanan, dan data anak yang terisolasi.

## **BAB III PRINSIP DAN STANDAR**

### **3.1 Prinsip Utama**

Dalam penyusunan data terpilah gender dan anak di Kota Dumai, terdapat beberapa prinsip utama yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman agar data yang dihasilkan valid, akurat, serta dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan.

#### **1. Prinsip Akurasi dan Keandalan**

Data harus dikumpulkan dari sumber resmi, menggunakan metode yang sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketepatan dan konsistensi dalam pencatatan menjadi kunci agar hasil analisis tidak menimbulkan bias.

#### **2. Prinsip Keterpilahan (*Disaggregation*)**

Semua data yang dikumpulkan harus dipilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, wilayah, dan karakteristik sosial lainnya. Keterpilahan ini bertujuan agar terlihat perbedaan kondisi antara laki-laki, perempuan, dan anak dalam setiap sektor pembangunan.

#### **3. Prinsip Relevansi dan Keterpaduan**

Data harus relevan dengan indikator dan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, perlu ada keterpaduan antar-OPD agar tidak terjadi duplikasi data dan agar data dapat diintegrasikan dalam satu sistem informasi daerah.

#### **4. Prinsip Konsistensi dan Keseragaman Format**

Penggunaan format, definisi, dan unit pengukuran harus seragam di seluruh perangkat daerah agar data mudah dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah.

#### **5. Prinsip Ketepatan Waktu**

Data harus dikumpulkan, diperbarui, dan dilaporkan secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan (misalnya tahunan atau semester), agar tetap relevan dengan kebutuhan perencanaan.

## 6. Prinsip Keterbukaan dan Pemanfaatan Data

Data terpilah bersifat publik dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan, asalkan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan etika penggunaan data.

### 3.2 Standar Variabel

Untuk memastikan data terpilah yang dihasilkan memiliki kualitas dan keseragaman, setiap OPD dan instansi penghasil data di Kota Dumai perlu menggunakan variabel standar berikut:

No.	Nama Variabel	Deskripsi	Contoh / Keterangan
1	<b>Jenis Kelamin</b>	Membedakan antara laki-laki dan perempuan.	L = Laki-laki, P = Perempuan
2	<b>Kelompok Umur</b>	Mengelompokkan individu sesuai rentang usia.	0–4 th, 5–9 th, 10–14 th, 15–17 th, 18–59 th, ≥60 th
3	<b>Wilayah/Desa/Kecamatan</b>	Lokasi tempat tinggal atau wilayah administrasi.	Kecamatan Dumai Barat, Bukit Kapur, dll.
4	<b>Status Sosial-Ekonomi</b>	Kondisi sosial atau ekonomi individu/keluarga.	Miskin, rentan, menengah, sejahtera
5	<b>Pendidikan</b>	Tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh.	Tidak sekolah, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi
6	<b>Pekerjaan/Status Pekerjaan</b>	Jenis pekerjaan atau aktivitas utama.	Pelajar, pekerja, wiraswasta, tidak bekerja
7	<b>Status Perkawinan</b>	Kondisi perkawinan bagi penduduk usia ≥10 tahun.	Belum kawin, kawin, cerai hidup, cerai mati
8	<b>Kondisi Khusus</b>	Identifikasi kelompok rentan.	Disabilitas, korban kekerasan, anak terlantar, dll
9	<b>Periode Data</b>	Waktu pengumpulan atau tahun data.	Semester I/II, Tahun 2025

10	<b>Sumber Data</b>	Instansi atau OPD penghasil data.	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS, dll
----	--------------------	-----------------------------------	---

### 3.3 Ketidaktepatan dalam Pengelolaan Data Secara Umum

Dalam praktiknya, masih sering dijumpai beberapa ketidaktepatan dalam pengelolaan data yang menyebabkan data terpilah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketidaktepatan tersebut perlu dihindari agar kualitas data Kota Dumai semakin baik dengan memperhatikan hal-hal seperti berikut:

#### 1. Tidak Memilah Data Berdasarkan Jenis Kelamin atau Umur

Banyak data masih bersifat agregat (total keseluruhan), tanpa pemisahan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak dapat digunakan untuk analisis gender.

#### 2. Ketidakkonsistenan Variabel antar-OPD

Perbedaan istilah, format, atau cara pengukuran antar OPD menyebabkan data sulit dibandingkan atau digabungkan.

#### 3. Duplikasi Data antar Sumber

Beberapa instansi mencatat data yang sama tanpa koordinasi, sehingga menimbulkan perbedaan angka antar sektor.

#### 4. Keterlambatan Pelaporan

Data tidak diperbarui secara rutin sehingga tidak mencerminkan kondisi terkini.

#### 5. Kurangnya Validasi dan Verifikasi

Data yang masuk tidak melalui proses pengecekan, menyebabkan kesalahan input atau ketidaksesuaian antar indikator.

#### 6. Tidak Ada Analisis Lanjutan

Data hanya dikumpulkan tanpa dilakukan analisis gender atau rekomendasi kebijakan, sehingga fungsinya terbatas.

#### 7. Kurangnya Dokumentasi Sumber Data

Tidak mencantumkan sumber atau tahun data membuat informasi sulit diverifikasi di kemudian hari.

## BAB IV FORMAT PENYUSUNAN DATA

### 4.1 Format Tabel Penyajian Data Terpilah

Untuk menjamin keseragaman dan kemudahan analisis, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Dumai diharapkan dapat menyusun dan menyampaikan data dengan format tabel yang terstandar. Format tabel penyajian data terpilah dapat digunakan untuk seluruh sektor dengan menambahkan kolom atau indikator sesuai kebutuhan.

#### 4.1.1 Contoh Penyajian Data dalam Bentuk Tabel

Tabel 1. 1 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tempat Pelayanan, dan Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan					
		Puskesmas		Rumah Sakit		Klinik	
		P	L	P	L	P	L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Eselon	Jumlah		
		P	L	P+L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				

Beberapa jenis penyajian tabel dapat dikelompokkan menjadi tabel satu arah, tabel dua arah, tabel tiga arah dan seterusnya, yang membedakan adalah jumlah variabel/karakteristik yang di cross-tabulasi, dan mengandung maksud bahwa isian sel menjelaskan rincian dari n variabel/karakteristik. Contoh tabel 1.1. diatas merupakan tabel 3 arah, sedangkan tabel 1.2. merupakan tabel 2 arah.

#### 4.1.2 Contoh Penyajian Data dalam Bentuk Grafik/Gambar

Penyajian data terpilah dalam bentuk grafik/gambar merupakan bentuk penyajian data secara visual. Grafik sangat baik untuk menunjukkan suatu perkembangan dari waktu ke waktu dan perbandingan antara dua hal (perempuan dan laki-laki) atau lebih. Penyajian dalam bentuk grafik juga lebih mudah dibaca dan ditarik kesimpulannya dibandingkan dalam bentuk tabel.

Gambar 1. 1 Jumlah Anak Usia 0 – 17 Tahun yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Kecamatan Tahun 2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, 2025 (diolah)

## **BAB V**

### **ALUR PENGUMPULAN DAN PELAPORAN**

#### **5.1 Proses Pengumpulan**

Pengumpulan data terpilah gender dan anak merupakan tahap awal dalam membangun basis data yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Proses ini dilakukan secara terencana dan terkoordinasi antara OPD, instansi vertikal, dan DPPPA Kota Dumai.

Langkah-langkah proses pengumpulan data meliputi:

1. Identifikasi sumber data: Menentukan jenis data yang diperlukan berdasarkan indikator gender dan anak yang telah ditetapkan (misalnya bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan perlindungan anak). Sesuai indikator yang relevan dengan tugas dan kewenangan masing-masing OPD dan instansi vertikal, tentukan indikator yang relevan dengan program dan kegiatan OPD yang tercantum dalam RPJMD, Renstra, atau RAD PUG jika tersedia.
2. Pengumpulan data primer dan sekunder:
  - a. Data primer, data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama di lapangan. Tujuan pengumpulan data primer adalah untuk memperoleh informasi faktual, terkini, dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat yang diperoleh melalui survei, wawancara, observasi, dan forum konsultasi publik.
  - b. Data sekunder, data yang sudah tersedia dan dikumpulkan dari berbagai lembaga atau instansi resmi. Data ini biasanya bersumber dari hasil pencatatan administratif, laporan tahunan, maupun publikasi resmi yang relevan dengan isu gender dan anak.
3. Klasifikasi data berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, wilayah administratif (kecamatan/kelurahan), dan status sosial ekonomi. Data dibuat dalam tabel di *Microsoft Excel* atau *Google Spreadsheet*.
  - a. Pisahkan setiap data menjadi dua kategori: laki-laki (L) dan perempuan (P).
  - b. Untuk data anak, tambahkan kolom kelompok umur (misalnya 0–4, 5–9, 10–14, 15–17 tahun).

- c. Cantumkan lokasi atau wilayah administrasi (kecamatan/kelurahan).
  - d. Sebutkan instansi penghasil atau sumber data.
  - e. Pastikan total (L + P) sesuai dengan angka keseluruhan.
  - f. Hindari penggunaan tanda “-” atau “tidak ada data” tanpa keterangan.
4. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh masing-masing OPD dengan pendampingan dari DPPPA untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan konsistensi.
  5. Penyimpanan dan dokumentasi dilakukan dalam format tabel yang telah distandarkan *soft file excel (.xlsx)*, sehingga data mudah diintegrasikan dan diolah lebih lanjut.

## 5.2 Mekanisme Pelaporan

Pelaporan data terpilah gender dan anak dilakukan secara periodik dan berjenjang, dengan mengacu pada sistem pelaporan data sektoral pemerintah daerah.

Mekanisme pelaporan diatur sebagai berikut:

1. OPD dan instansi vertikal menyusun data terpilah gender dan anak sesuai indikator yang relevan dengan tugas dan kewenangan masing-masing, menggunakan template resmi yang disediakan oleh DPPPA. (*link format terlampir*)
2. Data disampaikan secara tahunan paling lambat pada Bulan Januari oleh pengelola data di masing-masing OPD ke Website Si-DATIN dalam bentuk *soft file excel (.xlsx)*
3. DPPPA melakukan kompilasi, analisis, dan validasi terhadap data yang diterima untuk memastikan kesesuaian dengan indikator dan format yang ditetapkan.
4. Hasil kompilasi dilaporkan kepada Bappeda Kota Dumai untuk digunakan dalam penyusunan kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan (seperti RPJMD, Renja, dan Renstra).
5. Laporan akhir disajikan dalam bentuk “Profil Gender dan Anak Kota Dumai” yang diterbitkan setiap tahun sebagai dokumen publik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

### 5.3 Contoh Penerapan Data Terpilah Gender dan Anak

Data terpilah gender dan anak tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan angka, tetapi merupakan dasar analisis dan pengambilan keputusan dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Dengan menggunakan data terpilah, Pemerintah Kota Dumai dapat memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan serta kondisi berbeda antara laki-laki, perempuan, dan anak.

Berikut beberapa contoh penerapan data terpilah gender dan anak di berbagai sektor:

No	Sektor	Permasalahan	Data Terpilah	Pemanfaatan
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi sekolah perempuan di tingkat menengah lebih rendah dibanding laki-laki	Jumlah siswa laki-laki dan perempuan menurut jenjang pendidikan, status sekolah (negeri/swasta), dan alasan putus sekolah.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Pendidikan dapat merancang program beasiswa khusus bagi siswi dari keluarga kurang mampu.</li> <li>2. Mendorong sekolah untuk menerapkan program pencegahan perkawinan anak dan edukasi kesetaraan gender.</li> <li>3. Menyusun indikator kinerja RPJMD yang mencerminkan peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah.</li> </ol>
2	Kesehatan	Angka kematian ibu dan balita masih relatif tinggi di beberapa kecamatan.	Angka kematian ibu, bayi, dan balita menurut jenis kelamin, wilayah, serta penyebab kematian.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Kesehatan dapat memfokuskan intervensi gizi dan layanan kesehatan ibu hamil di wilayah dengan angka kematian tinggi.</li> <li>2. Menyediakan layanan kesehatan reproduksi remaja berbasis sekolah untuk mengurangi kehamilan usia dini.</li> <li>3. Menyusun kebijakan alokasi tenaga kesehatan yang lebih proporsional berdasarkan kebutuhan wilayah.</li> </ol>

3	Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Terdapat kesenjangan kesempatan kerja dan upah antara laki-laki dan perempuan	Jumlah pekerja menurut jenis kelamin, jenis pekerjaan, sektor ekonomi, dan tingkat pendidikan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Tenaga Kerja dapat mengembangkan program pelatihan kewirausahaan perempuan berbasis potensi lokal.</li> <li>2. Mendorong penyediaan lapangan kerja ramah perempuan melalui kerja sama dengan sektor swasta.</li> <li>3. Memantau capaian indikator kesetaraan upah dalam laporan pembangunan ekonomi daerah.</li> </ol>
4	Perlindungan Anak	Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di beberapa wilayah kota.	Kasus kekerasan terhadap anak berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis kekerasan, dan pelaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DPPPA bersama aparat penegak hukum dapat memperkuat mekanisme perlindungan dan layanan pemulihan anak korban kekerasan</li> <li>2. Menetapkan kelurahan ramah anak berdasarkan data kasus dan kebutuhan layanan.</li> <li>3. Menyusun kampanye edukatif berbasis data lokal untuk pencegahan kekerasan anak.</li> </ol>
5	Sosial dan Kependudukan	Tingginya jumlah kepala keluarga perempuan dan penyandang disabilitas yang belum terlayani program sosial.	Kepala keluarga menurut jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan kondisi disabilitas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dinas Sosial dapat memperluas program bantuan sosial adaptif bagi keluarga rentan perempuan</li> <li>2. Mengembangkan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas perempuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.</li> </ol>

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Ringkasan**

Pedoman Penyusunan Data Terpilah Gender dan Anak Kota Dumai disusun sebagai panduan praktis bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal dalam mengelola data yang responsif terhadap kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak.

Melalui pedoman ini, Pemerintah Kota Dumai diharapkan dapat:

1. Menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpilah menurut jenis kelamin, umur, wilayah, dan karakteristik sosial lainnya.
2. Menguatkan sinergi antar instansi dalam pengumpulan, pelaporan, dan integrasi data secara sistematis dan berkelanjutan.
3. Menjadikan data terpilah sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan yang inklusif.

Dengan tersedianya pedoman ini, proses pengumpulan hingga pemanfaatan data diharapkan berjalan lebih seragam, terarah, terintegrasi di seluruh OPD dan instansi vertikal di wilayah Kota Dumai.

### **6.2 Ajakan**

Pembangunan yang berkeadilan tidak dapat terwujud tanpa keterlibatan semua pihak. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) mengajak seluruh OPD penghasil data, Instansi vertikal, Lembaga masyarakat dan dunia usaha, serta Akademisi dan media untuk bersama-sama menguatkan komitmen dalam penyediaan dan pemanfaatan data terpilah gender dan anak. Setiap unit kerja diharapkan berperan aktif dalam

- a. Mengumpulkan data sesuai format dan variabel yang telah distandarkan;
- b. Melaporkan data secara berkala dan konsisten;
- c. Menggunakan hasil analisis data untuk merumuskan program dan kegiatan yang berpihak pada perempuan dan anak.

Kolaborasi lintas sektor ini merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak dalam seluruh aspek pembangunan daerah.

### **6.3 Harapan**

Melalui penerapan pedoman ini, Pemerintah Kota Dumai berharap:

1. Terbentuknya sistem data terpisah gender dan anak yang terpadu, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
2. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola dan menganalisis data responsif gender dan anak.
3. Terwujudnya perencanaan dan penganggaran pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based*) dan berorientasi pada keadilan sosial.
4. Tumbuhnya komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Dumai sebagai kota yang inklusif, responsif gender, dan layak anak.

Demikian Buku Pedoman Penyelenggaraan Data Terpisah Gender dan Anak Kota Dumai ini disusun. Besar harapan kami pedoman ini dapat menjadi panduan sekaligus pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan data terpisah gender dan anak di Kota Dumai. Semoga pedoman ini dapat menginspirasi lahirnya berbagai upaya terbaik dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, setara gender, dan mendukung terciptanya Kota Dumai yang ramah serta layak bagi anak.

## REFERENSI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.  
(2021). *Pedoman Penyelenggaraan Data Terpilah Gender dan Anak*.  
Bandung: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kota Bandung

## LAMPIRAN

1. Link Format Tabel Data Terpilah Gender dan Anak

<https://bit.ly/formatdataterpilahkotadumai>

2. Link Website Si-DATIN

<https://sidatin.dumaikota.go.id/>

3. Jenis Sektor dan Indikator Data Terpilah Gender dan Anak

No	Sektor	Indikator
1	Indikator Makro	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2		Indeks Pembangunan Gender (IPG)
3		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
4		Angka Harapan Hidup (AHH) Berdasarkan Jenis Kelamin
5		Harapan Lama Sekolah (HLS) Berdasarkan Jenis Kelamin
6		Rata-Rata Lama Sekolah (RRLS) Berdasarkan Jenis Kelamin
7		Pengeluaran Per Kapita Berdasarkan Jenis Kelamin
8		Indeks Paritas AHH
9		Indeks Paritas HLS
10		Indeks Paritas RRLS
11		Indeks Paritas Pengeluaran Per Kapita
12		Keterlibatan Perempuan di Parlemen

13		Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
14		Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja
15	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan
16		Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
17		Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama
18		Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Perkawinan
19		Jumlah Penduduk dan Keluarga Berdasarkan Kecamatan
20		Jumlah Kepala Keluarga Perempuan Berdasarkan Kecamatan
21		Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) Berdasarkan Kecamatan
22		Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan
23		Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan
24		Kesehatan
25	Faktor Risiko Penyebab Kematian Berdasarkan Jenis Kelamin	
26	Angka Kematian Ibu (AKI)	
27	Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab	
28	Kematian Ibu Berdasarkan Kelompok Umur	
29	Kematian Ibu Berdasarkan Kecamatan	
30	Kematian Ibu pada Fase Hamil	
31	Kematian Ibu pada Fase Persalinan	
32	Kematian Ibu pada Fase Nifas	
33	Kunjungan Ibu Hamil K1 Berdasarkan Kecamatan	
34	Kunjungan Ibu Hamil K4 Berdasarkan Kecamatan	

35	Pemberian Tablet Zat Besi (Fe1 dan Fe3) pada Ibu Hamil
36	Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan
37	Pelayanan Nifas pada Ibu Nifas Berdasarkan Kecamatan
38	Pemberian Vitamin A pada Ibu Nifas
39	Pasangan Usia Subur (PUS)
40	Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif
41	Peserta KB Aktif Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi
42	Peserta KB Pascapersalinan
43	Peserta KB Pascapersalinan Berdasarkan Jenis Alat Kontrasepsi
44	Usia Perkawinan Pertama Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
45	Usia Pertama Hamil Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur
46	Angka Kesakitan Berdasarkan Jenis Kelamin
47	Penderita Penyakit Menular Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Penyakit
48	Penderita Penyakit Tidak Menular Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Penyakit
49	Penduduk Berobat Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan Kesehatan
50	Penduduk Dirawat Inap Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan Kesehatan
51	Komposisi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin
52	Pelayanan Kesehatan bagi Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin
53	Pelayanan Kesehatan bagi Kelompok Masyarakat Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin
54	Korban Penyalahgunaan Napza Berdasarkan Jenis Kelamin dan Karakteristik

		Ekonomi
55		Korban Penyalahgunaan Napza Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
56		Korban Penyalahgunaan Napza Telah Direhabilitasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Klinik Rehabilitasi
57		Korban Penyalahgunaan Napza Telah Direhabilitasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
58		Korban Penyalahgunaan Napza Telah Direhabilitasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Karakteristik Ekonomi
59		Perilaku Merokok Berdasarkan Jenis Kelamin dan Wilayah Tempat Tinggal
60		Perilaku Merokok Berdasarkan Jenis Kelamin dan Karakteristik Ekonomi
61		Jumlah Tenaga Medis Berdasarkan Jenis Kelamin
62		Jumlah Dokter Spesialis Obgin dan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin
63		Jumlah Perawat dan Bidan Berdasarkan Jenis Kelamin
64		Jumlah Tenaga Farmasi Berdasarkan Jenis Kelamin
65		Jumlah Tenaga Gizi, Kesehatan Masyarakat, dan Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Jenis Kelamin
66		Jumlah Tenaga Analis Kesehatan dan Rekam Medis Berdasarkan Jenis Kelamin
67		Jumlah Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Kecamatan
68		Daftar Kawasan Tanpa Asap Rokok Berdasarkan Kecamatan
69		Jumlah Toilet Umum Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan
70		Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Berdasarkan Kecamatan
71		Akses Air Minum Berkualitas dan Berkelanjutan Berdasarkan Kecamatan
72	Pendidikan	Jumlah Penduduk Tidak/Belum Pernah Bersekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

73	Jumlah Penduduk Tidak/Belum Tamat SD Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
74	Jumlah Penduduk Lulus SD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
75	Jumlah Penduduk Lulus SMP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
76	Jumlah Penduduk Lulus SMA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
77	Jumlah Penduduk Lulus Diploma Berdasarkan Jenis Kelamin
78	Jumlah Penduduk Lulus S1/S2/S3 Berdasarkan Jenis Kelamin
79	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
80	APK SMP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
81	APK SMA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
82	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
83	APM SMP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
84	APM SMA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
85	Angka Putus Sekolah (APtS) SD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
86	APtS SMP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
87	APtS SMA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
88	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin
89	APS Usia 13-15 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin
90	APS Usia 16-18 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin
91	Angka Kelulusan (AL) SD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
92	AL SMP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
93	AL SMA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin

94	Angka Melanjutkan Sekolah (AMS) SD/Sederajat ke SMP/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
95	AMS SMP/Sederajat ke SMA/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
96	Angka Buta Aksara (ABA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur ( $\leq$ 59 tahun)
97	ABA Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Lansia ( $>$ 59 tahun)
98	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Negeri dan Swasta Berdasarkan Jenis Kelamin
99	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta Berdasarkan Jenis Kelamin
100	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta Berdasarkan Jenis Kelamin
101	Jumlah Peserta Didik Sekolah RA Berdasarkan Jenis Kelamin
102	Jumlah Peserta Didik Sekolah MI Berdasarkan Jenis Kelamin
103	Jumlah Peserta Didik Sekolah MTs Berdasarkan Jenis Kelamin
104	Jumlah Peserta Didik Sekolah MA Berdasarkan Jenis Kelamin
105	Jumlah Peserta Didik (Santri) Berdasarkan Jenis Kelamin
106	Jumlah Peserta Didik Sekolah Luar Biasa (SLB) Berdasarkan Jenis Kelamin
107	Jumlah Peserta Didik Paket A, B, dan C Berdasarkan Jenis Kelamin
108	Jumlah Peserta Didik Lulus Paket A, B, dan C Berdasarkan Jenis Kelamin
109	Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin
110	Jumlah Peserta Didik Mendapatkan Beasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin
111	Persentase Peserta Didik Mengikuti Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin

112		Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S2/S3 Berdasarkan Jenis Kelamin
113		Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1/DIV Berdasarkan Jenis Kelamin
114		Jumlah Guru Tersertifikasi Berdasarkan Jenis Kelamin
115		Jumlah Tutor Kejar Paket A, B, dan C Berdasarkan Jenis Kelamin
116		Jumlah Sekolah Dasar Negeri dan Swasta
117		Jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta
118		Jumlah Sekolah Menengah Atas Negeri dan Swasta
119		Jumlah Sekolah di Bawah Kementerian Agama (RA, MI, MTs, dan MA)
120		Jumlah Pondok Pesantren
121		Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB)
122		Pelanggan Saluran Telepon/HP Berdasarkan Jenis Kelamin
123		Pengguna Personal Komputer Berdasarkan Jenis Kelamin
124		Pengguna Internet Berdasarkan Jenis Kelamin
125	Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Jenis Kelamin
126		Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Jenis Kelamin
127		Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
128		Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Kegiatan
129		Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
130		Jumlah Penduduk Menganggur Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
131		Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
132		Jumlah Penduduk Menganggur Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

133	Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama
134	Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama
135	Jumlah Penduduk Bekerja pada Sektor Formal/Informal Berdasarkan Jenis Kelamin
136	Jumlah Penduduk Bekerja pada Sektor Formal/Informal Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
137	Jumlah Penduduk Bekerja pada Sektor Formal/Informal Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
138	Jumlah Penduduk Pekerja Penuh Berdasarkan Jenis Kelamin
139	Jumlah Penduduk Pekerja Paruh Waktu Berdasarkan Jenis Kelamin
140	Jumlah Penduduk Setengah Penggangur Berdasarkan Jenis Kelamin
141	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin
142	Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
143	Jumlah Tenaga Kerja Migran (AKAD dan AKAN) Berdasarkan Jenis Kelamin
144	Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin
145	Jumlah Penduduk Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan
146	Jumlah Kepala Keluarga Miskin Berdasarkan Kecamatan
147	Persentase Rumah Tangga Penerima Bantuan dari Pemerintah Berdasarkan Jenis Bantuan dan Kecamatan
148	Daftar Koperasi Aktif
149	Jumlah Pengurus dan Anggota Koperasi Berdasarkan Jenis Kelamin
150	Daftar Lumbung Pangan Masyarakat

151		Daftar Kelompok Tani Perkebunan
152		Daftar Kelompok Tani Peternakan
153		Daftar Kelompok Tani Tanaman Pangan
154		Jumlah Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Perkebunan Berdasarkan Jenis Kelamin
155		Jumlah Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Peternakan Berdasarkan Jenis Kelamin
156		Jumlah Pengurus dan Anggota Kelompok Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin
157		Daftar Kelompok Tani Wanita
158		Jumlah Pengurus dan Anggota Kelompok Tani Wanita Berdasarkan Jenis Kelamin
159		Jumlah Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perkebunan Berdasarkan Jenis Kelamin
160		Jumlah PPL Peternakan Berdasarkan Jenis Kelamin
161		Jumlah PPL Tanaman Pangan Berdasarkan Jenis Kelamin
162		Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Berdasarkan Jenis Kredit Usaha
163	Politik dan Pengambilan Keputusan	Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Daerah Pemilihan
164		Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Partai Politik
165		Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Komisi
166		Jumlah Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
167		Jumlah Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan
168		Jumlah Jaksa dan Pejabat Kejaksaan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

169	Jumlah Hakim, Panitera, dan Pejabat Pengadilan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan
170	Jumlah Hakim, Panitera, dan Pejabat Pengadilan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
171	Jumlah Polisi dan Pejabat Kepolisian Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan
172	Jumlah Polisi dan Pejabat Kepolisian Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
173	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin dan Instansi Pemerintah Daerah
174	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Jabatan
175	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pangkat/Golongan
176	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
177	Daftar Partai Politik Aktif
178	Jumlah Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin
179	Jumlah Keanggotaan Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin
180	Camat Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
181	Lurah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
182	Jumlah Pengurus dan Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Jenis Kelamin
183	Jumlah Pengurus Rukun Warga (RW) Berdasarkan Jenis Kelamin
184	Jumlah Pengurus Rukun Tetangga (RT) Berdasarkan Jenis Kelamin
185	Jumlah Peserta Musrenbang Tingkat Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin

186	Hukum dan Sosial Budaya	Jumlah Perkara Pidana dan Perdata
187		Jumlah Perceraian Berdasarkan Faktor Penyebab
188		Jumlah Gugatan Perceraian Berdasarkan Alasan
189		Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Lapas
190		Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
191		Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Kasus
192		Jumlah Penghuni Rutan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Rutan
193		Jumlah Penghuni Rutan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
194		Jumlah Penghuni Rutan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Kasus
195		Jumlah Pengurus dan Petugas Lapas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Lapas
196		Jumlah Pengurus dan Petugas Rutan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Rutan
197		Jumlah Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin
198		Angka Kesakitan Lansia (Morbiditas)
199		Jumlah Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
200		Jumlah Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
201		Jumlah Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Aktivitas yang Dilakukan
202	Jumlah Penduduk Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status/Lapangan Pekerjaan Utama	
203	Jumlah Penduduk Lansia Bekerja pada Sektor Formal/Informal Berdasarkan Jenis Kelamin	

204		Jumlah Penduduk Lansia di Rumah Perlindungan Sosial Tresna Werdha Berdasarkan Jenis Kelamin
205		Jumlah Penduduk Lansia Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin
206		Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Disabilitasnya
207		Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
208		Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Aktivitas yang Dilakukan
209		Jumlah Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status/Lapangan Pekerjaan Utama
210		Jumlah Keluarga Pr KS Berdasarkan Kecamatan
211		Jumlah Keluarga KS I Berdasarkan Kecamatan
212		Jumlah Keluarga KS II, III Ke atas Berdasarkan Kecamatan
213		Jumlah Keluarga Rawan Sosial Ekonomi Berdasarkan Kecamatan
214		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis PMKS
215		Jumlah PMKS Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Bantuan
216		Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Bencana
217		Jumlah Pengungsi Korban Bencana Alam Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Bencana
218		Jumlah Petugas Penyapu Jalan Berdasarkan Jenis Kelamin
219		Jumlah Petugas Pengangkut Sampah Berdasarkan Jenis Kelamin
220	Kekerasan terhadap	Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan
221		Rasio Kekerasan terhadap Perempuan

222	Perempuan	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
223		Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
224		Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama
225		Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Perkawinan
226		Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan
227		Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Kejadian Perkara
228		Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pemberian Jenis Pelayanan
229		Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Frekuensi Kekerasan
230		Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
231		Jumlah Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
232		Jumlah Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
233		Jumlah Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pekerjaan Utama
234		Jumlah Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Hubungan dengan Korban
235		Jumlah Pelaku Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kebangsaan Pelaku
236		Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang Ditangani Pihak Kepolisian
237		Jumlah Korban Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Pidana
238		Jumlah Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Pidana
239		Jumlah Kasus Penyalahgunaan Napza
240		Kelembagaan

241	Pengarusutamaan Gender (PUG)	Daftar Kebijakan Teknis Operasional PUG
242		Daftar Rencana Pencapaian PUG (RAD PUG, Renja Pokja PUG, Roadmap PUG, dll.)
243		Jumlah Alokasi Anggaran APBD Memfasilitasi PUG
244		Daftar Instansi Pemerintah Daerah Memiliki Anggaran untuk Memfasilitasi PUG
245		Daftar Instansi Pemerintah Daerah Memiliki Dokumen Perencanaan Responsif Gender
246		Daftar Instansi Pemerintah Daerah Memiliki Dokumen Anggaran Responsif Gender
247		Daftar Kelompok Kerja/Forum PUG
248		Jumlah Focal Point Gender Berdasarkan Jenis Kelamin
249		Daftar Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Focal Point Gender pada Instansi Pemerintah Daerah
250		Daftar Jenis Sosialisasi/Pelatihan PUG pada Instansi Pemerintah Daerah
251		Jumlah PNS Mengikuti Sosialisasi/Pelatihan PUG Berdasarkan Jenis Kelamin
252		Jumlah Perencana Terlatih Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Berdasarkan Jenis Kelamin
253		Jumlah Inspektur/Auditor Terlatih PPRG Berdasarkan Jenis Kelamin
254		Jumlah Fasilitator Pelatihan/Pendampingan PPRG Berdasarkan Jenis Kelamin
255		Jumlah Gender Champion Berdasarkan Jenis Kelamin
256		Daftar Instansi Pemerintah Daerah Memiliki dan Memanfaatkan Data terpilah gender dan anak
257	Daftar Instansi Pemerintah Daerah Memanfaatkan Metode Analisis Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran	
258	Daftar Program/Kegiatan Responsif Gender pada Instansi Pemerintah Daerah	

259	Daftar Isu/Masalah Gender pada Program/Kegiatan di Setiap Instansi Pemerintah Daerah
260	Daftar Isu/Masalah Gender pada Tingkat Kelembagaan di Setiap Instansi Pemerintah Daerah
261	Daftar Ketersediaan Sarana/Prasarana PUG pada Instansi Pemerintah Daerah
262	Daftar Lembaga Masyarakat Terlibat dalam Kelompok Kerja PUG
263	Daftar Dunia Usaha Terlibat dalam Kelompok Kerja PUG
264	Daftar Perguruan Tinggi Terlibat dalam Kelompok Kerja PUG
265	Daftar Lembaga Masyarakat Terlibat dalam Program/Kegiatan Responsif Gender
266	Daftar Dunia Usaha Terlibat dalam Program/Kegiatan Responsif Gender
267	Daftar Perguruan Tinggi Terlibat dalam Program/Kegiatan Responsif Gender
268	Daftar Lembaga Masyarakat Terlibat dalam Kajian PUG
269	Daftar Dunia Usaha Terlibat dalam Kajian PUG
270	Daftar Perguruan Tinggi Terlibat dalam Kajian PUG
271	Jumlah Tenaga Pelayanan Terlatih Menangani Perempuan Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin
272	Daftar Pusat Konsultasi Hukum/Lembaga Bantuan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan
273	Daftar Unit/Pusat Pelayanan bagi Perempuan Korban Kekerasan
274	Daftar Rumah Perlindungan Sosial bagi Perempuan Terlantar
275	Daftar Organisasi/Kelompok/Gerakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Pemberdayaan Perempuan
276	Daftar Organisasi/Kelompok/Gerakan Perlindungan Perempuan

277		Daftar Gugus Tugas/Satuan Tugas Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Pemberdayaan Perempuan
278		Daftar Gugus Tugas/Satuan Tugas Perlindungan Perempuan
279		Daftar Kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan/Pemberdayaan Perempuan Berbasis Masyarakat di Kecamatan
280		Daftar Kegiatan Perlindungan Perempuan Berbasis Masyarakat di Kecamatan
281		Daftar Kecamatan Sayang Ibu
282		Daftar Rumah Sakit Sayang Ibu
283	Tumbuh Kembang Anak	Jumlah Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (0 - 5, 6 - 9, 10 - 13, dan 14 -17 Tahun)
284		Jumlah Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Agama
285		Jumlah Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
286		APK dan APM PAUD/Sederajat Berdasarkan Jenis Kelamin
287		Jumlah Peserta Didik Prasekolah Berdasarkan Jenis Kelamin
288		Kelangsungan Hidup Anak
289	Jumlah Kasus Kematian Balita Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan	
290	Angka Kematian Bayi (AKB)	
291	Jumlah Kasus Kematian Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan	
292	Jumlah Bayi Lahir Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin	
293	Bayi Memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap Berdasarkan Jenis Kelamin	
294	Bayi (0-6 Bulan) Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif Berdasarkan Jenis Kelamin	
295	Inisiasi Menyusui Dini (IMD) bagi Bayi Baru Lahir Berdasarkan Jenis Kelamin	
296	Bayi Menerima MP-ASI Berdasarkan Jenis Kelamin	

297		Anak (2 Tahun) Masih Mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) Berdasarkan Jenis Kelamin
298		Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah Berdasarkan Jenis Kelamin
299		Balita Gizi Buruk, Kurang, Stunting, Baik, dan Lebih Berdasarkan Jenis Kelamin
300		Balita Gizi Buruk, Kurang, Stunting, Baik, dan Lebih Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kecamatan
301		Jumlah Anak Mengalami Sakit dan Keluhan Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin
302		Jumlah Anak Teregistrasi dan Tidak Teregistrasi Kependudukan Berdasarkan Jenis Kelamin
303		Jumlah Anak Memiliki dan Tidak Memiliki Akta Lahir Berdasarkan Jenis Kelamin
304		Jumlah Anak Memiliki dan Tidak Memiliki Kartu Identitas Anak Berdasarkan Jenis Kelamin
305		Angka Kepemilikan Buku Kartu Ibu dan Anak
306		Jumlah Anak Tinggal Bersama Bapak dan Ibu Kandung Berdasarkan Jenis Kelamin
307		Jumlah Anak Tinggal Bersama Ibu Kandung Berdasarkan Jenis Kelamin
308		Jumlah Anak Tinggal Bersama Bapak Kandung Berdasarkan Jenis Kelamin
309		Jumlah Anak Tinggal Bersama Keluarga Lain Berdasarkan Jenis Kelamin
310		Jumlah Anak Menikah di Usia 16 Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin
311		Jumlah Anak Ditangani Puspaga Berdasarkan Jenis Kelamin
312		Jumlah Anak Keluarga Miskin Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Bantuan
313	Perlindungan Anak	Jumlah Kekerasan terhadap Anak (0-17 Tahun)
314		Rasio Kekerasan terhadap Anak

315	Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur (0 - 5, 6 - 9, 10 - 13, dan 14 -17 Tahun)
316	Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan
317	Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Kekerasan
318	Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tempat Kejadian Perkara
319	Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pemberian Jenis Pelayanan
320	Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Hubungan dengan Korban
321	Jumlah Pelaku Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Hubungan dengan Korban
322	Jumlah Anak Mendapat Layanan dalam Kategori Perlindungan Khusus Berdasarkan Jenis Kelamin
323	Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur (5-14 Tahun) Berdasarkan Jenis Kelamin
324	Jumlah Pekerja Anak (0-17 Tahun) di Sektor Berbahaya (Prostitusi, Narkoba, Asisten Rumah Tangga, dll.)
325	Jumlah Anak (0-17 Tahun) Dibebaskan dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
326	Jumlah Anak Terlantar Berdasarkan Jenis Kelamin
327	Jumlah Anak Jalanan Berdasarkan Jenis Kelamin
328	Jumlah Anak Gelandangan Berdasarkan Jenis Kelamin
329	Jumlah Anak Korban Terorisme Berdasarkan Jenis Kelamin
330	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Berdasarkan Jenis Kelamin

331	Jumlah Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kelamin
332	Jumlah Anak dari Keluarga Miskin Berdasarkan Jenis Kelamin
333	Jumlah Anak Korban Paham Radikalisme Berdasarkan Jenis Kelamin
334	Jumlah Anak Korban Kecelakaan di Tempat Rekreasi Berdasarkan Jenis Kelamin
335	Jumlah Anak Pengedar Napza Berdasarkan Jenis Kelamin
336	Jumlah Anak Korban Tawuran/Gengster Berdasarkan Jenis Kelamin
337	Jumlah Anak Korban dan Pelaku LGBT Berdasarkan Jenis Kelamin
338	Jumlah Anak Korban dan Pelaku Bullying di Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin
339	Jumlah Anak Korban Kebijakan Berdasarkan Jenis Kelamin
340	Jumlah Anak Korban Malpraktik Berdasarkan Jenis Kelamin
341	Jumlah Anak Korban Kecelakaan Lalu-Lintas Berdasarkan Jenis Kelamin
342	Jumlah Anak Korban Bencana (Darat, Laut, dan Udara) Berdasarkan Jenis Kelamin
343	Jumlah Anak Korban dan Pelaku Pornografi Berdasarkan Jenis Kelamin
344	Jumlah Anak Korban Bencana Alam Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Bencana
345	Jumlah Anak Pengungsi Korban Bencana Alam Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Bencana
346	Jumlah Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) di Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Kategori Perlindungan Khusus (ada 15)
347	Mekanisme Penanggulangan Bencana Memperhatikan Kepentingan Anak
348	Jumlah Perkara Pidana dan Perdata Anak/Anak yang Berhadapan dengan Hukum
349	Jumlah Proses Diversi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

350		Jumlah Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Kasus
351	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Daftar Kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA)
352		Daftar Kebijakan Teknis Operasional PHA
353		Daftar Rencana Pencapaian PHA (RAD PUG, Renja Pokja PUG, Roadmap PUG, dll.)
354		Jumlah Alokasi Anggaran APBD Memfasilitasi PHA
355		Daftar Instansi Pemerintah Daerah Memiliki Anggaran untuk Memfasilitasi PHA
356		Daftar Kelompok Kerja/Forum PHA
357		Daftar Program/Kegiatan Responsif Hak Anak pada Instansi Pemerintah Daerah
358		Daftar Ketersediaan Sarana/Prasarana PHA pada Instansi Pemerintah Daerah
359		Daftar Lembaga Masyarakat Terlibat dalam Kelompok Kerja PHA
360		Daftar Dunia Usaha Terlibat dalam Kelompok Kerja PHA
361		Daftar Perguruan Tinggi Terlibat dalam Kelompok Kerja PHA
362		Daftar Lembaga Masyarakat Terlibat dalam Program/Kegiatan Responsif Hak Anak
363		Daftar Dunia Usaha Terlibat dalam Program/Kegiatan Responsif Hak Anak
364		Daftar Perguruan Tinggi Terlibat dalam Program/Kegiatan Responsif Hak Anak
365		Daftar Lembaga Masyarakat Terlibat dalam Kajian PHA
366		Daftar Dunia Usaha Terlibat dalam Kajian PHA
367		Daftar Perguruan Tinggi Terlibat dalam Kajian PHA
368		Skor Kabupaten/Kota Layak Anak
369		Jumlah SDM Terlatih Konvensi Hak Anak Berdasarkan Jenis Kelamin
370		Daftar Fasilitas Informasi Layak Anak Berdasarkan Kecamatan
371	Daftar Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif Ramah Anak Berdasarkan Kecamatan	
372	Daftar Sekolah Ramah Anak Berdasarkan Kecamatan	
373	Jumlah Tenaga Pelayanan Terlatih Menangani Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin	
374	Daftar Pusat Konsultasi Hukum/Lembaga Bantuan Hukum bagi Anak Korban Kekerasan	
375	Daftar Unit/Pusat Pelayanan bagi Anak Korban Kekerasan	
376	Daftar Lembaga Penyedia Layanan Pengasuhan/Perawatan Anak	
377	Daftar Rumah Perlindungan Sosial bagi Anak Terlantar	
378	Daftar Organisasi/Kelompok/Gerakan Pemenuhan Hak Anak	
379	Daftar Organisasi/Kelompok/Gerakan Perlindungan Anak	
380	Daftar Gugus Tugas/Satuan Tugas Pemenuhan Hak Anak	
381	Daftar Gugus Tugas/Satuan Tugas Perlindungan Anak	
382	Daftar Kegiatan Pemenuhan Hak Anak Berbasis Masyarakat di Kecamatan	
383	Daftar Kegiatan Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat di Kecamatan	

4. Narahubung Data Terpilah Gender dan Anak Kota Dumai

<b>No</b>	<b>Narahubung</b>	<b>No HP</b>	<b>Instansi</b>
1	Afinda Nurhidayah, A.Md.I.Kom	+6282170909748	Dinas PPPA Kota Dumai
2	Aulia Rahmawati S.Kom	+6285278665959	Dinas PPPA Kota Dumai
3	Neliyanti, S.Pi, M.Si	+6281371882414	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Dumai



**Dumai**

كوت دوماي | Kota Idaman

**#SatuDataIndonesia**